



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR



**KANTOR KECAMATAN
BURAU**

**RENCANA KERJA
PERUBAHAN (RENJA-P)**

2025

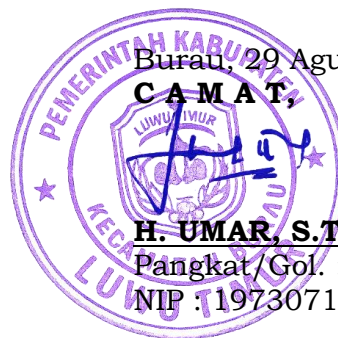
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur disusun dengan segala keterbatasan yang ada pada kami.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis pula. Renja Perubahan ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada Hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025 dengan tetap berdasarkan pada RENSTRA 2025-2029 serta berbagai kekuatan/ potensi, hambatan dan peluang yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis didalamnya yang mengandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program yang realistis dalam mengantisipasi masa depan sesuai dengan yang diharapkan.

Kami berharap Rencana Kerja ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Kecamatan Burau. Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Burau masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Kerja ini dimasa yang akan datang.

Dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.



Burau, 29 Agustus 2025

CAMAT,

H. UMAR, S.T., M.Si.

Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a

NIP. 19730714 200003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Burau dan Capaian Renstra kantor Kecamatan Burau	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Burau	13
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	16
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	18
3.1. Tujuan dan Sasaran.....	18
3.2. Program dan Kegiatan	19
BAB V PENUTUP	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja-P PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan (Renstra) kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja-P mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Pemerintah Kecamatan Burau merupakan organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta melaksanakan sebagian kewenangan bupati berdasarkan pelimpahan kewenangan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Burau Tahun 2025 merupakan upaya meningkatkan mutu pelayanan dan penyesuaian target kinerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan ke-2 tahun 2025.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Burau merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor Kecamatan Burau. Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025, landasan hukum yang dijadikan acuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Noor 1312);
5. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Sulawesi selatan Tahun 2008-2028;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 48);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 55 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Kab. Luwu Timur;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan petunjuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Burau Tahun 2025 adalah:

1. Agar terbangun konsistensi perencanaan tahunan dengan perencanaan lima tahunan Kantor Kecamatan Burau;
2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Burau;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Burau 2025;

4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Burau Tahun 2025;
5. Mewujudkan pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Luwu Timur;
6. Sebagai pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Burau Tahun 2025;
7. Sebagai penyusunan kebijakan anggaran, program dan kegiatan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Rencana Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Burau Tahun 2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kerja Perubahan Kantor Kecamatan Burau yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renja Perubahan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai pada Triwulan II, yang memuat target capaian/realisasi indikator program dan kegiatan, serta permasalahan pelaksanaan kegiatan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengemukakan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indicator kinerja dan pendanaan indikatif pada perubahan dan disajikan dalam tabel. Matrik Perubahan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.

BABV PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Kecamatan Burau 2025 didasarkan dan merujuk pada Rencana Strategis Kecamatan Burau Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2029.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Burau dan Capaian Renstra Kecamatan Burau

Evaluasi ditujukan untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan publik yang diimplementasikan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, selain itu evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai rencana. Dari tabel 2.1 dibawah ini dapat dilihat hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Burau sampai triwulan II tahun 2025.

Pada tahun 2025 Kecamatan Burau melaksanakan 6 (Enam) program dengan 14 (Empat Belas) kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Dua) sub kegiatan. Total pagu anggaran Kecamatan Burau tahun 2025 (Anggaran pokok) adalah Rp. 3.314.965.850,- dengan Realisasi total sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 2.222.059.000,- (67,03%). Untuk lebih jelasnya kinerja Kecamatan Burau pada tahun 2025 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel. 2.1
(Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025 (Tahun berjalan)

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Burau

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun n-3 (2023)	Target & Realisasi Kinerja Program/ kegiatan Tahun lalu (n-1) (2024)			Target Program & Kegiatan (Renja PD) Tahun n (2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan 2025 (n)	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100 %		100 %	99,42 %	99,42%	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi tepat waktu	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)	10 Dok		2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	4 Dok	40 %
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	10 Dok		2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	4 Dok	40 %
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	10 Dok		2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	4 Dok	40 %
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	50 Dok		10 Dok	10 Dok	100%	10 Dok	20 Dok	40 %

7.1.1.2.01.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik	100 %		100 %	97,06 %	96,88%	100 %	100 %	100 %
7.1.1.2.01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	20 Org		17 Org	17 Org	100%	17 Org	33 Org	206,25 %
7.1.1.2.01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	82 Dok		18 Dok	18 Dok	100%	18 Dok	36 Dok	43,902 %
7.1.1.2.01.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.1.1.2.01.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	20 Dok		4 Dok	4 Dok	100%	4 Dok	8 Dok	40 %
7.1.1.2.01.04.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.1.1.2.01.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun (Dokumen)	60 Dok		4 Dok	4 Dok	100%	0 Dok	0 Dok	0,2667 %
7.1.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.1.1.2.01.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)	189		25 Stl	25 Stl	100%	0	25	13,228 %
7.1.1.2.01.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Dokumen)	60 Dok		12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	24 Dok	40 %

7.1.1.2.01.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	17 Org		3 Org	3 Org	100%	5 Org	8 Org	47,059 %
7.1.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase rata rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	100 %		100 %	99,99 %	99,99%	100 %	100 %	100 %
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (Jenis)	15 Jns		10 Jns	10 Jns	100%	10 Jns	20 Jns	133,33 %
7.1.1.2.06.01.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	20 Jns		14 Jns	14 Jns	100%	14 Jns	28 Jns	140 %
7.1.1.2.06.01.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (Jenis)	6 Jns		6 Lbr	6 Lbr	100%	6 Jns	12 Jns	200 %
7.1.1.2.06.01.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	252 Eks		12 Eks	12 Eks	100%	48 Eks	96 Eks	38,095 %
7.1.1.2.06.01.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	24325 Org		2.707 Org	2.706 Org	99,96%	2.379 Org	5085 Org	20,904 %
7.1.1.2.06.01.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (Kali)	6353 Org		1.109 Org	1.108 Org	99,98%	885 Org	1983 Org	31,214 %
7.1.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.1.1.2.07.02	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diakan (unit)	5 Unt		0	0	0%	1 Unit	1 Unit	20 %
7.1.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)	14 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	0	2	14,286 %
7.1.1.2.07.06	Pengadaan peralatan mesin dan lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (unit)	38 Unt		15 Unit	15 Unit	100%	1 Unit	16 Unit	42,105 %

7.1.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	12		3 Kpl	3 Kpl	100%	0	3	25 %
7.1.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase rata rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.1.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	6150 Lbr		1.200 Lbr	1.200 Lbr	100%	1.542 Lbr	2742 Lbr	44,585 %
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	60 Rek		60 Rek	60 Rek	100%	60 Rek	120 Rek	200 %
7.1.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan (Jenis)	10 Unt		2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	4 Unit	40 %
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan (Orang)	9 Org		9 Org	9 Org	100%	10 Org	19 Org	211,11 %
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik	100 %		100 %	97,73 %	95,24%	100 %	100 %	100 %
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	11 Unt		7 Unit	6 Unit	85,71%	6 Unit	12 Unit	109,09 %
7.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara (Unit)	27		0	0	0	0	0	0 %
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	20 Unt		36 Unit	36 Unit	100%	26 Unit	62 Unit	310 %

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	3	Unt		1	Unit	1	Unit	100%	1	Unit	2	Unit	66,667	%
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	3	Unt		0		0		0	0		0		0	%
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100	%		100	%	58,33	%	58,33%	100	%	100	%	100	%
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase capaian urusan pemerintahan yang dilimpahkan keoadaa camat yang dilimpahkan (%)	100	%		100	%	58,33	%	58,33%	100	%	100	%	100	%
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan (Lembar)	300	Lbr		60	Lbr	35	Lbr	58,33%	6	Lbr	41	Lbr	13,667	%
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah administrasi perizinan yang dikeluarkan (lembar)	8000	Lbr		0		0		0	0		0		0	%
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100	%
7.01.03.2.01.	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan (%)	100	%		100	%	100	%	100%	100	%	100	%	100	%
7.01.03.2.01.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalm forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah pertisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan (Orang)	150	Org		10	%	10	%	100%	140	Org	150	Org	100	%

7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah kader PKK desa yang diberdayakan (orang)	49 Org		49 Org	49 Org	100%	49 Org	98 Org	200 %
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100 %		0	0		100 %	100 %	100 %
7.01.04.2.01.	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan (%)	100 %		0	0		100 %	100 %	100 %
7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolksian Negara Republic Indonesia Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertical Di Wilayah Kecamatan	Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi (kasus)	20 Kasus		0	0	0	4 Kasus	4 Kasus	25 %
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah rapat dalam upaya himbauan atau pencegahan pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan (kali)	20 Kali		0	0	0	4 Kali	4 Kali	25 %
7.01.04.2.02.	Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peaturan kepala daerah	persentase pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan Perda dan Perkada (%)	100 %		-	-	-	100 %	%	%
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Pertauran Perundang-Undangan Dan/ Aau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan koordinasi/sinergi yang dilaksanakan (kali)	20 Kali		0	0	0	4 Kali	4 Kali	6,6667 %

07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan (%)	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Persentase rekomendasi forum koordinasi pimpinan kecamatan yang ditindaklanjuti (%)	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase penyelenggaran pemrinthan desa yang berjalan sesuai standard dan ketentuan perundangang yang berlaku	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintaha desa	Persentase fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100 %
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah peraturan desa dan peraturan kepala desa yang difasilitasi penyusunannya (dokumen)	180 Dok		100 %	100 %	100%	36 Dok	36 Dok	100 %
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang di tindaklanjuti (%)	100 %		100 %	100 %	100%	0	100 %	100 %
7.01.06.2.01.17	Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Persentase desa yang tertib administrasinya (%)	100 %		100 %	100 %	100%	0	100 %	100 %
7.01.06.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang melakukan pembangunan kawasan perdesaan (Desa)	18 Desa		0	0		18 Desa	18 Desa	100 %

2.2 Analisis Kinerja Kantor Kecamatan Burau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 56 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan fungsi Tata Kerja Kecamatan. Organisasi Kecamatan merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai peran sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di wilayah kecamatan menjadi kewenangan daerah. Satuan Kerja Perangkat daerah kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Mengacu Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, maka SKPD membuat laporan evaluasi atas rencana kerja yang dilaksanakan setiap periode pembangunan yang mengacu ke rencana strategis dan RPJMD.

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefits) dan dampak (infac). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan OPD dilakukan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK) maupun terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU).

Yang terdiri atas 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dan tingkat capaiannya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2.2
(Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Burau
Kabupaten Luwu Timur

NO	Indikator	SPM/ stand ar nasio nal	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Proyeksi	Ket
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				(thn n- 4)	(thn n- 3)	(thn n- 2)	(thn n- 1)	(thn-n)	(thn n- 4)	(thn n- 3)	(thn n- 2)	(thn n- n1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	-	-	78	80	85	85	86,2	92,74	95,25	85,31	85,01	-	86,3	
2	Nilai LAKIP (%)	-	-	58	60	63	65,5	70,01	62,11	64,05	67,05	68,05	-	70,35	

Penjelasan pencapaian kinerja Kecamatan Burau sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Burau

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi Tahun 2024 dengan tahun 2025 terkait pelayanan publik di Kecamatan Burau. Target dan realisasi pelayanan publik dengan menggunakan peraturan Menpan dan RB nomor 16 Tahun 2016 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat. Pada Tahun 2024 Kantor Kecamatan Burau sudah menggunakan survey kepuasan masyarakat dan nilai survey menunjukkan kategori melampaui target dengan target survey 85 dan terealisasi 85,01, artinya pelayanan yang ada dikecamatan Burau baik perizinan maupun non perizinan cukup baik walaupun masih ada permasalahan-permasalahan yang disebabkan antara lain masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa dan kelurahan tentang informasi terkait syarat dan ketentuan pelayanan. Sedangkan pada Tahun 2025 dengan target Indeks Kepuasan Masyarakat 86,2 namun realisasi belum bisa digambarkan disebabkan indeks kepuasan Masyarakat untuk Tahun 2025 baru sampai triwulan II sedangkan penilaian dilakukan sampai akhir tahun 2025.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Burau

Untuk melihat perbandingan capaian antara target dan realisasi tahun 2024 dengan tahun 2025 terkait akuntabilitas kinerja di Kecamatan Burau. Pada tahun 2024 target dan realisasi nilai AKIP dengan target 65.5 dan terealisasi CC (68.5) dan tahun 2025 dengan target nilai B (70.01) namun realisasi belum bisa digambarkan disebabkan penilaian dilakukan pada awal Tahun 2025. Capaian pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dikarenakan masih sulit untuk menggambarkan capaian-capaian baik capaian program maupun capaian kegiatan, disebabkan beberapa hal yaitu :

- Masih ada Indikator kegiatan tidak dapat di ukur
- Pendukung atas capaian program dan kegiatan belum maksimal

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Burau

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kegiatan tahun 2025 antara lain :

1. Sarana dan prasarana belum lengkap sesuai dengan kebutuhan
2. Sistem dan prosedur kerja yang belum optimal
3. Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah
4. Kemampuan personil kecamatan terbatas
5. Keterbatasan anggaran
6. Masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat khususnya dari kelompok perempuan dari segi kehadiran bisa dikatakan cukup baik hanya saja masih kurang dalam memberikan usulan yang berkaitan dengan pemberdayaan kelompok perempuan dalam musrenbang. Sehingga sebagian besar usulan dalam musrenbang adalah berkaitan dengan infrastruktur.

➤ **Aspek kajian dari sumber daya manusia**

Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa terwujud. Apabila dilihat pada saat ini antara jumlah dan kemampuan pegawai dibanding dengan beban tugas masih kurang memadai. Faktor yang mempengaruhi secara intern yaitu motivasi kerja dan secara ekstern meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern atau pengawasan melekat belum berjalan sebagaimana mestinya.

➤ **Aspek kajian dari sarana dan prasarana**

Kondisi saat ini dengan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan faktor yang mempengaruhi baik internal maupun faktor eksternal, aparatur kecamatan tetap dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sebaik-

baiknya. Namun dengan sarana dan prasarana yang terbatas di kantor kecamatan Burau, pelayanan prima masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Dengan kondisi tersebut aparatur kecamatan harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan masyarakat

➤ **Aspek kajian dari jumlah anggaran**

Kurang seimbangnya dukungan anggaran dibandingkan dengan beban tugas yang dilaksanakan dengan faktor yang mempengaruhi secara internal dengan tugas pembantuan sebagian kewenangan yang diberikan bupati kepada camat belum disertai dengan sumber daya manusia, keuangan, materi dan methodologinya dengan permasalahan / tantangan yakni aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut selalu untuk berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa terwujud.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja Kantor Kecamatan Burau dilakukan beberapa hal :

1. Mengusulkan penambahan sumber daya manusia baik PNS maupun Upah Jasa ke BKD dalam upaya peningkatan sumber daya.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di kantor kecamatan Burau untuk dapat memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
3. Turut mengundang dan mensosialisasikan kepada kelompok perempuan agar dapat lebih berperan aktif didalam kegiatan musrenbang, sehingga kelompok perempuan dapat lebih di berdayakan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 mengacu kepada Visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan sesuatu yang ingin dicapai yang dirumuskan secara spesifik, realistis dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Dengan merujuk kepada hasil evaluasi kinerja tahun 2024 dan tahun berjalan 2025 serta perumusan permasalahan dan tantangan yang mungkin dihadapi pada Tahun 2025 baik internal maupun eksternal, serta dengan memperhatikan kerangka pendanaan dan capaian Kinerja Perangkat Daerah, guna Keberlanjutan Pembangunan maka tujuan dan sasaran Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur selama Periode 5 (lima) tahun terakhir masih dianggap relevan untuk dilanjutkan dan di perkuat pencapaiannya dalam kerangka penajaman perwujudan pencapaian Visi Pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dan Renstra Kecamatan Burau Tahun 2025-2029.

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang dalam penetapannya mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan, juga dapat menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai kedepan untuk lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua program dan kegiatan.

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi, Kecamatan Burau menetapkan tujuan untuk 2025 adalah ***“Terwujudnya***

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas”.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yaitu berupa hasil yang diinginkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan. tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Penetapan indikator sasaran Kecamatan Burau secara menyeluruh diharapkan dapat memberikan fokus dalam penentuan strategi dan prioritas. Sasaran pembangunan Kecamatan Burau kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Kantor Kecamatan Burau dengan Indikator Nilai SAKIP

Secara lebih seksama, keterkaitan antara misi pembangunan jangka menengah Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur periode tahun 2021-2026 dengan tujuan, sasaran dan indikator-indikator pembangunan yang digunakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Burau Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu sesuai SOP	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	70,01
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	86,2

3.2 Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2025 Kecamatan Burau merencanakan 6 (Enam) Program dan 14 (Empat Belas) Kegiatan dengan 32 (Tiga Puluh Dua)

Sub Kegiatan dan pada Renja Perubahan ini Kecamatan Burau melaksanakan 6 (Enam) Program dan 14 (Empat Belas) kegiatan dengan 32 (Tiga Puluh Dua) sub kegiatan dengan total pagu anggaran Perubahan Kecamatan Burau Tahun 2025 adalah Rp. 3.545.297.328,-.

Berikut Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Burau dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.4.1
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN KECAMATAN BURAU
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Perubahan Tahun 2025				Sumber Dana
		Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	KECAMATAN BURAU	100%	3.421.670.328	APBD
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tepat waktu		100%	19.765.000	APBD
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		2 Dokumen	12.150.000	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu		2 dokumen	2.115.000	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu		2 dokumen	2.365.000	APBD
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja yang disusun		10 dokumen	3.135.000	APBD
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan		100%	2.537.007.328	APBD
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan		20 org	2.513.177.328	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun tepat waktu		12 dokumen	23.830.000	APBD
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan		100%	12.560.000	APBD
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun		4 Dokumen	12.560.000	APBD

04	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasikan		100%	23.116.000	APBD
8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan		12 laporan	4.146.000	APBD
9	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		4 orang	18.970.000	APBD
05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ratapada -rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah		100%	291.655.000	APBD
10	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		7 Paket	9.305.000	APBD
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan		11 Paket	15.064.000	APBD
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan		4 Paket	17.750.000	APBD
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan Yang disediakan		60 Eksmplar	6.000.000	APBD
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 laporan	125.500.000	APBD
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	118.036.000	APBD
06	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan		100%	63.200.000	APBD
16	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang diadakan		6 Unit	63.200.000	APBD
07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi		100%	193.682.000	APBD
17	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 laporan	6.346.000	APBD
18	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 laporan	47.526.000	APBD
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 laporan	15.850.000	APBD
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	123.960.000	APBD
08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dipelihara		100%	280.685.000	APBD

21	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau kendaraan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		6 Unit	22.065.000	APBD
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara		18 Unit	19.500.000	APBD
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		2 Unit	239.120.000	APBD
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		100%	4.745.000	APBD
9	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan		100%	4.745.000	APBD
24	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan	4.745.000	APBD
III.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	KECAMAT AN BURAU	100%	79.299.000	APBD
10	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	Presentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan		100%	79.299.000	APBD
25	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		5 Lembaga	16.747.500	APBD
26	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		12 Laporan	62.551.500	APBD
IV.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	KECAMAT AN BURAU	100%	9.635.000	APBD
11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan		100%	6.950.000	APBD
27	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		4 Laporan	4.275.000	APBD
28	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		4 Laporan	2.675.000	APBD

12	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penerapan Penegakan Perda dan Perkada		100%	2.685.000	APBD
29	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		4 Laporan	2.685.000	APBD
V.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	KECAMATAN BURAU	100%	23.023.000	APBD
13.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase rekomendasi Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yang ditindaklanjuti		100%	23.023.000	APBD
30	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		12 Dokumen	23.023.000	APBD
VI.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	KECAMATAN BURAU	100%	6.925.000	APBD
14.	Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan		100%	6.925.000	APBD
31	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		36 Dokumen	3.580.000	APBD
32	Koordinasi pendampingan desa diwilahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan		18 Laporan	3.345.000	APBD
JUMLAH TOTAL					3.545.297.328	

BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Burau tahun 2025 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan Kecamatan Burau Tahun 2025, dengan mengintegrasikan dukungan perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan Burau, Penyusunan rencana kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan isu-isu strategis khususnya di Kecamatan Burau. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan pada Kantor Kecamatan Burau dalam kurun waktu tahun 2025, sehingga upaya Kantor Kecamatan Burau dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Burau, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikian Renja Perubahan Kecamatan Burau Tahun 2025 disusun agar digunakan sebagai pedoman penetapan kebijakan, program dan strategi yang dilakukan pada tahun berikutnya. Kami menyadari bahwa penyusunan Renja Perubahan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan, dan atasnya diucapkan terima kasih.

Burau, 29 Agustus 2025

Camat,



H. UMAR, S.T., M.Si.

Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a

NIP. 19730714 200003 1 002